

MANAJEMEN AUDIT PENGELOLAAN DANA BOS DI SMA AL BADAR CIPULUS

Endang Dudus Abdul Kudus¹, Wildan Mufti Nurhadi²

^{1,2} STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

Email: ¹abdulquddusdudus660@gmail.com, ²wildanmufti06@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan aspek krusial dalam mendukung keberlangsungan layanan pendidikan yang bermutu, khususnya pada satuan pendidikan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen audit pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, serta pengawasan penggunaan dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen keuangan Dana BOS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah sesuai dengan ketentuan dan Petunjuk Teknis BOS yang berlaku, terutama dengan pemanfaatan sistem digital seperti ARKAS dan SIPLAH. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, antara lain keterbatasan alokasi dana untuk honorarium guru dan tenaga kependidikan serta perlunya penguatan transparansi dan audit internal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan monitoring internal, digitalisasi administrasi secara menyeluruh, serta penguatan peran yayasan dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan.

Kata kunci: *Manajemen Audit, Dana BOS, Akuntabilitas, Transparansi, Pendidikan*

Abstract

Management of School Operational Assistance (BOS) funds is a crucial aspect in supporting the sustainability of quality education services, particularly in private educational institutions. This study aims to analyze the audit management of BOS funds at Al Badar Cipulus High School, including planning, implementation, recording, reporting, and monitoring of fund use. This research used a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques included interviews, observations, and documentation studies of BOS fund financial documents. The results indicate that, in general, BOS fund management at Al Badar Cipulus High School complies with applicable BOS provisions and Technical Guidelines, particularly through the use of digital systems such as ARKAS and SIPLAH. However, several obstacles remain, including limited funding allocation for teacher and education personnel honoraria and the need for strengthened transparency and internal audits. This study recommends improved internal monitoring, comprehensive digitalization of administration, and strengthening the role of foundations in supporting sustainable education financing.

Keywords: *Audit Management, BOS Funds, Accountability, Transparency, Education*

PENDAHULUAN

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang bertujuan mendukung pembiayaan operasional non-personalia pada satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan. Program ini menjadi instrumen strategis pemerintah untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran serta mendorong peningkatan kualitas manajemen sekolah. Pengelolaan Dana BOS harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2023) menegaskan bahwa Dana BOS diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, melengkapi sarana dan prasarana pendidikan, serta memperkuat tata kelola manajemen sekolah yang profesional. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai permasalahan, antara lain keterlambatan penyaluran dana, lemahnya dokumentasi pembukuan, ketidaktepatan alokasi anggaran, serta belum optimalnya pengawasan internal sekolah (Suryanto & Rachmawati, 2021).

Sekolah swasta yang berada di wilayah non-perkotaan, tantangan pengelolaan Dana BOS sering kali diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan administrasi keuangan. Selain itu, penerapan sistem pelaporan berbasis digital melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) menuntut ketelitian dan pemahaman teknis yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan maupun keterlambatan pelaporan apabila tidak dikelola dengan baik.

Dalam konteks lokal, SMA Al Badar Cipulus sebagai sekolah swasta penerima Dana BOS memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh penggunaan dana dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis BOS dan dipertanggungjawabkan melalui sistem ARKAS tahun anggaran 2024. Dana BOS yang diterima sekolah diharapkan mampu mendukung kegiatan pembelajaran, pengembangan sarana dan prasarana, serta kelancaran manajemen sekolah. Namun, untuk menjamin hal tersebut, diperlukan mekanisme evaluasi yang sistematis melalui audit pengelolaan Dana BOS.

Audit pengelolaan Dana BOS menjadi langkah strategis untuk menilai kesesuaian penggunaan dana dengan regulasi, mengukur tingkat transparansi dan akuntabilitas pelaporan, serta mengidentifikasi potensi kelemahan dalam sistem pengelolaan keuangan sekolah.

Menurut Nuraini (2022), audit pendidikan berfungsi sebagai alat pengendalian internal yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada perbaikan berkelanjutan. Oleh karena itu, pelaksanaan audit pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus menjadi penting sebagai bagian dari kegiatan Manajemen Audit Pendidikan, guna menjaga integritas, efektivitas, dan keberlanjutan program BOS dalam mendukung mutu pendidikan (Putra, 2023).

Pendidikan merupakan sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai dan pengelolaan yang akuntabel.

Pemerintah Indonesia melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berupaya menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Dana BOS diperuntukkan bagi pembiayaan operasional nonpersonalia sekolah dan harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Dalam praktiknya, pengelolaan Dana BOS di tingkat sekolah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan regulasi, serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini menuntut adanya audit pengelolaan Dana BOS sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi. SMA Al Badar Cipulus sebagai sekolah swasta penerima Dana BOS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan ketentuan dan berorientasi pada peningkatan mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada kajian manajemen audit pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus.

KAJIAN TEORI

1. Manajemen Pengelolaan Dana BOS

Manajemen pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah yang bersumber dari dana pemerintah. Pengelolaan Dana BOS bertujuan untuk mendukung pembiayaan operasional pendidikan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, pengelolaan Dana BOS menuntut kemampuan manajerial sekolah dalam menyusun rencana penggunaan dana berbasis kebutuhan riil sekolah, melaksanakan penggunaan dana sesuai juknis, serta menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan Dana BOS guna mencegah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

2. Audit Pengelolaan Keuangan Pendidikan

Audit pengelolaan keuangan pendidikan merupakan proses pemeriksaan sistematis terhadap pengelolaan dana pendidikan untuk menilai tingkat kepatuhan, efektivitas, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai instrumen evaluatif untuk mengidentifikasi kelemahan pengelolaan keuangan dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dalam konteks Dana BOS, audit mencakup pemeriksaan kesesuaian penggunaan dana dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), kelengkapan bukti transaksi, serta ketepatan pelaporan keuangan. Audit pengelolaan keuangan pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai tujuan pendidikan dan memberikan manfaat optimal bagi peningkatan mutu layanan pendidikan (Mardiasmo, 2018).

3. Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi Dana BOS

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip utama dalam pengelolaan Dana BOS yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Akuntabilitas mengandung

makna bahwa setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum, sedangkan transparansi menuntut keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk warga sekolah dan masyarakat. Penerapan kedua prinsip ini diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang jelas, akses informasi penggunaan dana, serta keterlibatan komite sekolah dalam pengawasan. Dalam perspektif manajemen pendidikan, akuntabilitas dan transparansi keuangan merupakan indikator tata kelola sekolah yang baik (*good school governance*) dan menjadi prasyarat terciptanya kepercayaan serta keberlanjutan program bantuan pemerintah (Mardiasmo, 2018).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah SMA Al Badar Cipulus. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap proses pengelolaan Dana BOS, serta studi dokumentasi terhadap RKAS, laporan realisasi anggaran, Buku Kas Umum (BKU), dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan pendekatan deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

SMA Al Badar Cipulus merupakan satuan pendidikan swasta yang memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebagai salah satu sumber utama pembiayaan operasional non-personalia. Penerimaan Dana BOS tersebut menuntut adanya pengelolaan keuangan sekolah yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus dilaksanakan melalui mekanisme organisasi yang melibatkan berbagai pihak. Kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama penggunaan dana, sementara bendahara BOS bertugas mengelola administrasi dan pencatatan keuangan. Selain itu, dibentuk tim BOS yang memiliki fungsi membantu proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik.

Perencanaan penggunaan Dana BOS disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dirancang pada awal tahun anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas sekolah. RKAS tersebut menjadi pedoman dalam pengalokasian dana pada setiap kegiatan operasional sekolah. Seluruh proses perencanaan, realisasi, dan pelaporan keuangan Dana BOS kemudian dicatat dan dilaporkan melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) sebagai sistem pelaporan resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, diperoleh beberapa temuan audit sebagai berikut:

1. Perencanaan Dana BOS

Perencanaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah disusun dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang mengacu pada kebutuhan operasional sekolah serta Petunjuk Teknis Dana BOS yang berlaku. RKAS disusun melalui rapat internal sekolah dengan melibatkan unsur pimpinan dan pengelola keuangan, sehingga secara administratif perencanaan telah memiliki dasar formal yang jelas. Keberadaan RKAS ini menunjukkan adanya upaya sekolah dalam menerapkan prinsip perencanaan keuangan yang terstruktur dan berbasis kebutuhan (Mulyasa, 2017).

Namun demikian, hasil audit menunjukkan bahwa keterlibatan komite sekolah dalam proses perencanaan Dana BOS masih terbatas. Peran komite sekolah cenderung bersifat informatif dan belum sepenuhnya partisipatif dalam penentuan prioritas penggunaan anggaran. Padahal, keterlibatan komite sekolah merupakan salah satu indikator penting transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan, khususnya dana yang bersumber dari pemerintah (Mardiasmo, 2018).

Keterbatasan partisipasi tersebut berpotensi mengurangi keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan serta membatasi fungsi kontrol sosial terhadap penggunaan Dana BOS. Dalam konteks manajemen pendidikan, perencanaan yang partisipatif tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan anggaran, tetapi juga memperkuat rasa memiliki dan kepercayaan publik terhadap sekolah (Sagala, 2013). Oleh karena itu, hasil audit ini menegaskan perlunya penguatan mekanisme perencanaan Dana BOS yang lebih inklusif dan transparan.

2. Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS

Pelaksanaan penggunaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus secara umum telah sesuai dengan rencana anggaran yang tertuang dalam RKAS. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, operasional sekolah, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran ini menunjukkan tingkat kepatuhan sekolah terhadap ketentuan penggunaan Dana BOS yang telah ditetapkan pemerintah.

Meskipun demikian, hasil audit menemukan bahwa dalam pelaksanaan penggunaan dana masih terdapat kelemahan pada aspek penataan dokumentasi bukti transaksi. Beberapa pengeluaran belum didukung oleh bukti fisik yang tersusun secara sistematis dan mudah ditelusuri. Kondisi ini dapat menimbulkan risiko administratif, terutama pada saat pemeriksaan atau audit lanjutan, karena kelengkapan bukti merupakan syarat utama akuntabilitas keuangan sekolah (Arikunto, 2010).

Dalam perspektif audit pengelolaan keuangan publik, dokumentasi yang tertib dan sistematis merupakan bagian dari sistem pengendalian internal yang harus dijaga secara konsisten (Mardiasmo, 2018). Selain itu, praktik pengelolaan dana pendidikan yang akuntabel menuntut adanya keterpaduan antara realisasi anggaran dan bukti pendukung yang valid agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum (OECD, 2017).

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah dilaksanakan melalui aplikasi ARKAS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bendahara BOS secara rutin melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana. Pemanfaatan aplikasi ARKAS menunjukkan adanya upaya sekolah dalam mengikuti sistem pelaporan keuangan berbasis digital yang ditetapkan pemerintah.

Namun demikian, hasil audit menunjukkan adanya keterlambatan dalam pengunggahan beberapa dokumen pendukung, seperti nota dan kuitansi transaksi. Keterlambatan ini berpotensi menurunkan kualitas laporan keuangan, terutama dari sisi ketepatan waktu dan kelengkapan informasi. Dalam sistem akuntabilitas publik, ketepatan waktu pelaporan merupakan salah satu indikator utama kualitas laporan keuangan (Bastian, 2015).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem pelaporan telah tersedia, implementasinya masih memerlukan penguatan dari sisi disiplin administrasi dan pengendalian internal. Pelaporan yang akurat, lengkap, dan tepat waktu sangat penting untuk menjamin transparansi pengelolaan Dana BOS serta mencegah terjadinya kesalahan administrasi yang berulang (OECD, 2017).

4. Pengawasan Internal

Pengawasan internal terhadap pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan keuangan. Pengawasan ini dilakukan melalui pemeriksaan laporan dan pemantauan penggunaan dana secara berkala. Keberadaan fungsi pengawasan ini menunjukkan adanya kesadaran pimpinan sekolah terhadap pentingnya kontrol internal dalam pengelolaan dana pendidikan.

Namun demikian, hasil audit menunjukkan bahwa pengawasan internal tersebut belum didukung oleh prosedur tertulis yang baku. Ketiadaan pedoman pengawasan yang jelas menyebabkan pengawasan masih bersifat administratif dan sangat bergantung pada inisiatif pimpinan. Akibatnya, pengawasan belum sepenuhnya sistematis dan berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya (Arikunto, 2010).

Temuan audit secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah berjalan sesuai regulasi, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek transparansi, dokumentasi, dan pengawasan internal. Hal ini sejalan dengan pendapat Nuraini (2022) yang menegaskan bahwa audit pendidikan tidak hanya berfungsi untuk menilai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pengelolaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian internal serta peningkatan keterlibatan komite sekolah dan warga sekolah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan Dana BOS.

Kemudian, ada juga suatu temuan dari penelaahan peneliti, di mana temuan ini dikategorikan dalam dua kategori sebagai berikut:

1. Temuan Positif

Berdasarkan hasil audit administrasi dan keuangan terhadap pengelolaan Dana BOS

di SMA Al Badar Cipulus, peneliti menemukan sejumlah praktik pengelolaan yang menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta upaya sekolah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran. Temuan-temuan positif ini diperoleh melalui penelaahan dokumen, pengecekan sistem pelaporan, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana BOS. Temuan positif tersebut mencerminkan adanya kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana BOS dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus menjadi indikator awal bahwa sekolah telah memiliki dasar pengelolaan keuangan yang cukup baik. Rincian temuan positif hasil audit tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Temuan Positif (Sumber: Dokumen olahan pribadi)

Temuan	Bukti
Pelaporan ARKAS tepat waktu	Cek sistem ARKAS dan buku kas
Pengadaan ATK & buku sesuai kebutuhan	Nota/observasi kelas
Kegiatan ekstrakurikuler berjalan aktif	Dokumentasi kegiatan

2. Temuan Ketidaksesuaian/Risiko

Di samping temuan positif, hasil audit juga mengidentifikasi sejumlah ketidaksesuaian dan potensi risiko dalam pengelolaan Dana BOS yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak sekolah. Temuan ini tidak serta-merta menunjukkan pelanggaran berat, namun mengindikasikan adanya kelemahan sistem, keterbatasan sumber daya, serta praktik administrasi yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip transparansi dan pengendalian internal. Identifikasi terhadap ketidaksesuaian dan risiko ini penting sebagai bagian dari fungsi audit, yaitu untuk mendeteksi potensi permasalahan sejak dini agar dapat dilakukan tindakan korektif dan preventif. Adapun ringkasan temuan ketidaksesuaian beserta dampak dan tingkat risikonya disajikan secara sistematis dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Temuan Ketidaksesuaian/Risiko (Sumber: Dokumen olahan pribadi)

Temuan	Dampak	Tingkat Risiko
Transparansi belum optimal (papan informasi BOS tidak terupdate)	Kurangnya kepercayaan warga sekolah	Sedang
Dokumen bukti fisik masih kurang rapi dan tidak terdigitalisasi	Risiko kehilangan dokumen	Tinggi
Belanja sarpras tanpa perbandingan harga	Pemborosan anggaran	Sedang
Evaluasi internal belum terjadwal	Potensi penyimpangan tak terdeteksi	Sedang
Bendahara merangkap tugas lain	Beban kerja tinggi kesalahan pencatatan	Tinggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus dilaksanakan melalui penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dengan melibatkan unsur pimpinan sekolah, bendahara BOS, dewan

guru, serta komite sekolah. Keterlibatan berbagai pihak tersebut mencerminkan adanya upaya penerapan prinsip partisipatif dalam perencanaan anggaran sekolah.

Pada tahap pelaksanaan, penggunaan Dana BOS telah mengacu pada ketentuan Petunjuk Teknis BOS yang berlaku. Pemanfaatan aplikasi ARKAS dan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLAH) menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan sistem pengelolaan dan pengadaan berbasis digital. Seluruh transaksi keuangan dicatat secara elektronik, sehingga mendukung kemudahan pengawasan, meningkatkan ketertelusuran data, serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Meskipun demikian, hasil audit juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pengelolaan Dana BOS. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah keterbatasan alokasi dana untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan, yang disebabkan oleh adanya pembatasan persentase belanja honor sebagaimana diatur dalam juknis BOS. Selain itu, aspek transparansi informasi kepada publik serta pelaksanaan audit internal secara berkala masih memerlukan peningkatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa walaupun sistem pengelolaan Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah berjalan relatif baik, penguatan tata kelola keuangan dan pengawasan internal tetap menjadi hal yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen audit pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMA Al Badar Cipulus pada umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku. Proses pengelolaan dana didukung oleh pemanfaatan sistem digital, seperti ARKAS dan SIPLAH, yang berperan dalam meningkatkan ketertiban administrasi, akurasi pencatatan, serta kemudahan dalam pengawasan dan pelaporan keuangan sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa tata kelola Dana BOS di SMA Al Badar Cipulus telah berjalan relatif baik dan terstruktur.

Penelitian ini juga menemukan adanya beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan. Aspek tersebut meliputi peningkatan transparansi informasi kepada publik, penguatan sistem monitoring dan pengendalian internal, serta keberlanjutan pembiayaan honorarium guru dan tenaga kependidikan yang masih menghadapi keterbatasan akibat kebijakan pembatasan alokasi belanja honor dalam juknis BOS. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem telah berjalan, optimalisasi tata kelola keuangan sekolah masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar SMA Al Badar Cipulus melakukan publikasi informasi pengelolaan Dana BOS secara berkala dan terbuka kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sekolah perlu melaksanakan audit internal secara rutin guna memperkuat fungsi pengawasan dan meminimalkan potensi risiko pengelolaan keuangan.

Selanjutnya, sekolah diharapkan dapat melakukan digitalisasi administrasi secara menyeluruh agar seluruh proses pengelolaan Dana BOS terdokumentasi dengan baik dan terintegrasi. Di samping itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pihak sekolah dan

yayasan dalam mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan, khususnya terkait peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, sehingga kualitas layanan pendidikan dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga.
- Fattah, N. (2022). Manajemen pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kemendikbudristek. (2022). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Jurnal Kebijakan Pendidikan, 12(3), 201–214.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*. Kemendikbudristek.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo. (2021). Manajemen keuangan publik. Yogyakarta: ANDI.
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Remaja Rosdakarya.
- Nuraini, R. (2022). Audit pendidikan sebagai instrumen pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan sekolah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 14(2), 85–96.
- Nurkolis, & Sulistyorini. (2021). Peran komite sekolah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 20(1), 45–57.
- OECD. (2017). *Education Finance and Accountability*. OECD Publishing.
- Putra, A. R., & Rahmawati, L. (2022). Dampak kebijakan Dana BOS terhadap sekolah swasta.
- Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sagala, S. (2013). *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Alfabeta.
- Suryanto, H., & Rachmawati, A. (2021). Analisis efektivitas pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dasar. *Journal of Educational Finance*, 3(4), 210–222.